

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
USAHA TAMBANG TIMAH YANG TIDAK MEMILIKI IUP,
IPR, DAN IUPK DI KABUPATEN BANGKA**
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungailiat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Ahmad Syarifudin
NIM. 401.11.11.069
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syarifudin
NIM : 401.11.11.069
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tambang Timah Yang Tidak Memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Syarifudin

HALAMAN PERSETUJUAN

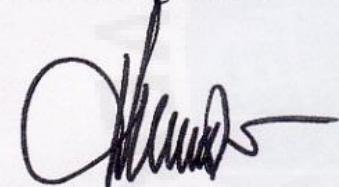
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG TIMAH YANG TIDAK MEMILIKI IUP, IPR, dan IUPK DI KABUPATEN BANGKA

SKRIPSI

Oleh :
Ahmad Syarifudin
NIM. 401.11.11.069
Konsentrasi : Hukum Pidana

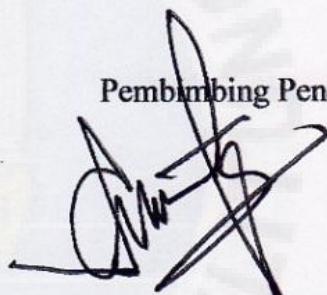
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Syamsul Hadi, SH, M.H
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



Toni, SH, M.H
NP. 608010028

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



Sigit Nugroho, S.H., M.H
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG TIMAH YANG TIDAK MEMILIKI IUP, IPR, DAN IUPK DI KABUPATEN BANGKA

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Syarifudin

NIM: 401.11.11.069

Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 01 Agustus 2016
Dan Dinyatakan Lulus

Majelis Penguji
Ketua

Syamsul Hadi, S.H, M.H.
NP. 606007014

Anggota II

Dr. Dwi Haryadi, S.H, M.H.
NP. 198307172012121004

Anggota

Toni. S.H, M.H.
NIP. 608010028

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Semangat terus, Doa, Usaha dan Jujur.

Orang yang baik adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain.

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti didalam hidup penulis :

- Untuk Ayah ku Jumata & Ibuku tercinta Dahlia, tak ada kata yang lebih bermakna yang mampu kuucap dan tiada suatu hal yang lebih berarti yang dapat ku beri untuk membalas kalian. Untuk kakak perempuan ku Siti Zoleha yang selalu mau mengalah kepada ku, dan kakak lelaki ku Muhammad
- Fahlevi & Zainudin Umaro serta adik ku Hidayat Amin & Fatransyah Subhi terima kasih atas dukungannya, kalian saudara ku yang ku cintai.
- Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.

ABSTRAK

Ahmad Syarifudin

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG TIMAH YANG TIDAK MEMILIKI IUP, IPR, DAN IUPK DI KABUPATEN BANGKA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Efektifitas, Pertambangan dan Tindak Pidana.

Pertambangan merupakan segala aktivitas dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK di Kabupaten Bangka dan Apa kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris sedangkan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai media informasi, penambah wawasan dan pengetahuan, serta agar lembaga legislatif lebih tepat mengambil kebijakan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perizinan pertambangan tidak berjalan secara efektif karena putusan pengadilan yang dijatuhkan terlampau ringan dan tidak memberi efek jera, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran tentang perizinan. Adapun kendala yang terdapat dalam penegakan hukum tersebut ialah adanya beberapa faktor yaitu faktor hukum dan Undang-Undang, penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan..

ABSTRAC

Ahmad Syarifudin

EFFECTIVENESS OF LAWS OF PLAYERS THAT HAVE NO BUSINESS IUP, IPR, AND IN THE DISTRICT BANGKA IUPK

Thesis, Faculty of Law, 2016

Keywords: Effectiveness, Mining and Crime

Mining is a flurry of activity in the framework of research, management and exploitation of mineral or coal that includes general investigation, exploration, feasibility, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, as well as post-mining activities. It is stipulated in Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. The formulation of the problem is How the effectiveness of IUP, IPR, IUPK in Bangka and what constraints the application of Article 158 of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal mining. The method used juridical empirical juridical approach while empirical and normative. Objectives and Benefits of research as a medium of information, enhancing awareness and knowledge, as well as more precise so that the legislature take the policy. application of Article of the offenses mining permits are not working effectively because of a court ruling that imposed too light and does not provide a deterrent effect, so there are many violations of licensing. The constraints contained in the application of that article is the verdict too light, the unpopularity of the Act, as well as lack of awareness of the people to obey the law.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : **Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap pelaku Usaha Tambang Timah yang Tidak Memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka.**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak DR. Ir. Muhammad Yusuf, Msi selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda, S.H. M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Wirazilmustaan selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah membantu memecahkan masalah-masalah dan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga terbentuklah karya tulis ini.
8. Bapak Toni, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang tanpa lelah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulisan dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
10. Untuk ibu darma selaku pengurus perpustakaan fakultas hukum terima kasih atas waktunya dan membantu menyediakan Referensi buku-buku dalam tugas ini.
11. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

12. Bapak Mohammad Solihin selaku hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data dan ilmu guna penulisan skripsi ini. Dan,
13. Lembaga Pemasyarakatan Sungailiat kelas II B terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data guna penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung. Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Balunjuk, September 2016

Penulis

Ahmad Syarifudin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	15
 BAB II HUKUM PERTAMBANGAN, IZIN DALAM PERTAMBANGAN DAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN	
A. Hukum Pertambangan	
1. Pengertian Hukum Pertambangan.....	20
2. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	23

3. Asas-Asas Dalam Pertambangan	24
4. Tujuan Pertambangan	25
B. Izin Dalam Pertambangan	
1. Memahami Izin Dalam Pertambangan.....	26
2. Izin Usaha Pertambangan(IUP).....	27
3. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).....	29
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).....	31
C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pertambangan	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Tindak Pidana Pertambangan.....	41
BAB III EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG TIMAH YANG TIDAK MEMILIKI IUP, IPR, DAN IUPK DI KABUPATEN BANGKA	
A. BagaimanaEfektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tambang Timah yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka.....	58
B. Apa saja kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tambang Timah.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN